UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HAINUM MAWADDAH ACEH, Prof. Dr. Muchsan S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

INTISARI ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 19

C. Tujuan Penelitian 19

D. Manfaat Penelitian 20

E. Keaslian Penelitian 21

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 23

A. Landasan Pustaka 23

1. Konsep Negara Hukum 23

2. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Tata Usaha Negara 40

3. Tinjauan tentang perlindungan hukum bagi PNS 43

4. Pengoptimalan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil . 49

B. Landasan Teori 45

1. *Grand Theory* yang Membahas tentang Negara Hukum Indonesia yang Memberikan Jaminan Hukum Khususnya Kepada Pegawai Negeri Sipil melalui PTUN Sebagai Salah Satu Unsur Kekuasaan Kehakiman 54

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HAINUM MAWADDAH ACEH, Prof. Dr. Muchsan S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. *Midle Theory* yang Membahas tentang Teori Keadilan yang Diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang Diberikan oleh Pemerintah yang Diwujudkan dalam Penjaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum sebagai Bagian dari Hak Pegawai Negeri Sipil 64

3. *Aplied Theory* Membahas tentang Pengawasan yang Diberikan PTUN terhadap perbuatan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara 70

BAB. III METODE PENELITIAN 78

A. Sifat Penelitian 78

B. Jenis Penelitian 79

C. Bentuk Data 80

D. Metode Pengumpulan Data 83

E. Analisa Data 84

F. Lain-Lain 85

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 87

A. Pelaksanaan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pegawai Negeri Sipil secara Optimal 87

1. Posisi Sengketa Kepegawaian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara 87

2. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara 107

3. Pengoptimalan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil 111

a. Sistem Penyelesaian Sengketa 111

a.1. Penyelesaian Melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) 118

a.2. Penyelesaian Melalui Peradilan 126

B. Kendala Hukum yang Menyebabkan Belum Mampunya Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Memberikan Perlindungan Hukum Secara Optimal Kepada Pegawai Negeri Sipil 135

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HAINUM MAWADDAH ACEH, Prof. Dr. Muchsan S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1. Kendala yang diakibatkan oleh Sistem Perundang-Undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa kepegawaian……. 135
2. Kendala yang diakibatkan oleh Sinkronisasi dan Harmonisasi peraturan perundangan……. 142
3. Kendala dalam proses eksekusi putusan…….. 146

C. Langkah yang dapat ditempuh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada PNS.
1. Upaya Untuk mengatasi Kendala yang diakibatkan oleh Sistem Perundang-Undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa kepegawaian …… 149
2. Upaya Untuk Mengatasi Kendala yang diakibatkan oleh Sinkronisasi dan Harmonisasi peraturan perundangan……. 151
3. Upaya untuk mengatasi Kendala dalam proses eksekusi putusan…….. 152

BAB V. PENUTUP..... 157
A. Kesimpulan..... 157
B. Saran 161

DAFTAR PUSTAKA